



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVYANTO WIDADI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 468164

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.400.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 2.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 13020 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 976.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3534 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.050.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2790 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 209.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **491.093.185**

1. MOBIL, CHEVROLET TRX 14 TURBO LTZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOBIL, JEEP LAND ROVER 2630 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 136.093.185
3. MOBIL, BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **190.923.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	350.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.432.816.185
III. HUTANG	Rp.	640.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.792.816.185

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.